

*Seminar Nasional*

**DINAMIKA PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERDESAAN:  
Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani**

Bogor, 19 Nopember 2008

**DINAMIKA KESEJAHTERAAN PETANI DAN  
NON PETANI DI INDONESIA:  
Suatu Analisis Makro vs Mikro**

oleh

**Nyak Ilham**



**PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
2008**

# **DINAMIKA KESEJAHTERAAN PETANI DAN NON PETANI DI INDONESIA: *Suatu Analisis Makro vs Mikro***

**Nyak Ilham**

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jl. A. Yani No 70 Bogor – 16161 (ny4kilham@yahoo.com)*

## **ABSTRAK**

Keberhasilan pembangunan suatu negara ditunjukkan oleh makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Studi ini bertujuan menganalisis dinamika kesejahteraan masyarakat pertanian dan non pertanian dalam kurun waktu 2002-2005 menggunakan pendekatan makro dan mikro. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari BPS. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik tabulasi, grafik dan gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) penggunaan indikator kesejahteraan makro hasilnya tidak sejalan dengan penggunaan indikator kesejahteraan mikro; (2) rumah tangga non pertanian relatif lebih sejahtera dibandingkan rumah tangga pertanian baik di desa maupun di kota, serta pada kelompok dengan kelas pendapatan yang sama; dan (3) rumahtangga non pertanian baik di kota maupun di desa serta pada berbagai kelas pendapatan lebih sensitif terhadap guncangan ekonomi dibandingkan rumahtangga pertanian. Implikasi kebijakan yang dapat diambil adalah: penggunaan indikator makro kesejahteraan masih belum cukup, diperlukan besaran dan kualitas tertentu dan untuk melihat lebih rinci diperlukan indikator mikro berupa pangsa pengeluaran pangan.

**Kata Kunci** : *kesejahteraan, indikator, mikro, makro*

## **PENDAHULUAN**

Indikasi keberhasilan pembangunan suatu negara atau wilayah yang banyak digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk lingkup nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk lingkup wilayah. Selain dipengaruhi faktor internal, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga dipengaruhi faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal. Secara internal, tiga komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Ketiga komponen tersebut sebaiknya berkedudukan sejajar dalam mengelola sumberdaya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya (Riasa, *et al.* 2002). Dalam prakteknya, selain bergerak dalam sektor produksi barang dan jasa, pemerintah lebih banyak berperan dalam sektor regulasi dan fasilitasi, termasuk mengendalikan dan mengantisipasi pengaruh eksternal yang bersifat negatif. Besaran dan arah peran pemerintah tersebut sangat menentukan peran dunia usaha dan masyarakat berpartisipasi

dalam pembangunan yang pada akhirnya menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Permasalahannya adalah menggunakan pertumbuhan PDB sebagai indikator kesejahteraan sifatnya masih sangat makro. Menurut Siregar (2007), masalah kemiskinan tidak dapat dipecahkan hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata dengan mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah (*trickle down effect*). Karena itu penggunaan indikator pertumbuhan ekonomi semata tidaklah cukup. Untuk mempertajam analisis, tingkat pertumbuhan ekonomi perlu dipilah lebih lanjut berdasarkan lapangan usaha, jenis pengeluaran, dan wilayah. Disamping itu, pada tingkat yang lebih mikro dengan menggunakan kaidah hukum Engle, tingkat kesejahteraan dapat dilihat hingga ke tingkat rumah tangga.

Studi ini bertujuan: (1) menganalisis dinamika tingkat kesejahteraan secara makro dengan menggunakan PDB baik pada tingkat nasional, regional, lapangan usaha, dan jenis pengeluaran; (2) menganalisis dinamika tingkat kesejahteraan secara mikro hingga ke tingkat rumah tangga berdasarkan pangsa pengeluaran pangan pada kelompok petani dan non petani menurut wilayah dan kelas pendapatan; dan (3) memberikan rekomendasi arah kebijakan pemerintah agar pembangunan yang dilakukan hasilnya menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

## **METODE PENELITIAN**

### **Kerangka Pemikiran**

#### *PDB sebagai Indikasi Kesejahteraan*

Nilai PDB menggambarkan aktivitas produksi dari suatu negara. Perhitungan PDB dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu sisi penawaran berdasarkan lapangan usaha menurut sektor dan sisi permintaan atau penggunaan yaitu untuk konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor.

Hal itu berarti, jika terjadi pertumbuhan PDB menunjukkan bahwa penggunaan sumberdaya yang tersedia untuk kegiatan berproduksi mengalami peningkatan, perkembangan dan penggunaan teknologi mengalami peningkatan, penyerapan tenaga kerja menjadi lebih banyak sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan antara pertumbuhan PDB dengan angka pengangguran dikenal sebagai Hukum Okun, yaitu setiap peningkatan satu persen pengangguran akan

menurunkan PDB 2,5 persen (Lipsey, *et.al.* 1992). Dengan demikian jika PDB meningkat seharusnya pengangguran menurun. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, namun kesejahteraan masyarakat secara umum tidak meningkat berarti ada ketidakseimbangan baik antar sektor maupun antar wilayah dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, selain pertumbuhan ekonomi, diperlukan juga indikator yang lebih mikro untuk melihat dinamika kesejahteraan masyarakat.

#### *Pangsa Pengeluaran Pangan sebagai Indikasi Kesejahteraan*

Secara mikro, tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat didekati dengan Hukum Engel. Menurut Hukum Engel pangsa pengeluaran pangan terhadap pengeluaran rumah tangga akan semakin berkurang dengan meningkatnya pendapatan (Deaton dan Muellbauer, 1980). Dalam keadaan harga barang dan selera masyarakat tetap maka peningkatan pendapatan menunjukkan peningkatan kesejahteraan karena jumlah barang yang dikonsumsi akan semakin meningkat (Varian, 1992).

Dengan perkataan lain menurunnya pangsa pengeluaran pangan suatu rumah tangga akan meningkatkan ketahanan pangan dan juga sebagai indikasi peningkatan kesejahteraan rumah tangga tersebut. Dalam teori kesejahteraan, jika kesejahteraan rumah tangga meningkat maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Menurut Ilham dan Sinaga (2007), pangsa pengeluaran mempunyai hubungan yang erat dengan berbagai ukuran ketahanan pangan yaitu tingkat konsumsi, keanekaragaman pangan, dan pendapatan regional. Makin rendah pangsa pengeluaran pangan rumah tangga maka makin tinggi dan beraneka ragam pangan yang dikonsumsi. Perilaku demikian secara umum hanya dapat dilakukan oleh individu, rumah tangga atau masyarakat yang makin meningkat kesejahtraannya.

#### **Cakupan**

Dari sisi makro cakupan studi ini bersifat nasional. Disagregasi untuk membedakan pertanian dan non pertanian digunakan proksi PDB berdasarkan sektor atau lapangan usaha yaitu pertanian dan non pertanian. Disagregasi berdasarkan wilayah digunakan untuk mempertajam analisis apakah ada senjang antara wilayah Jawa dan luar Jawa.

Dari sisi mikro cakupan studi juga bersifat nasional. Namun penajaman analisis untuk melihat apakah perilaku yang terjadi sama antara tingkat nasional dan tingkat provinsi, diambil contoh tiga provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Jawa

Tengah. Analisis yang lebih tajam dilakukan dengan cara mendisagregasi menjadi petani dan non petani pada wilayah desa kota dan kelas pendapatan.

Dinamika kesejahteraan yang ingin dilihat terkait dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan termasuk adanya kebijakan kenaikan harga BBM tahun 2005 (Tabel 1) dan kenaikan harga beras selama periode 2002-2005 (Tabel 2). Dua guncangan ekonomi tersebut dianggap penting karena kedua produk tersebut sangat menentukan inflasi di Indonesia (CSIS, 2002; Gunawan, 1991; Amang, 1984). Kenaikan inflasi dengan pendapatan tetap menyebabkan daya beli menjadi turun sehingga kesejahteraan menurun.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2005, kenaikan harga BBM pertama terjadi pada tanggal 1 Maret. Sementara itu BPS melakukan survey Susenas pada Bulan Februari – Maret. Dengan demikian dampak kenaikan harga BBM bisa terjadi pada tahun 2005 ataupun pada tahun 2006, terutama dampak kenaikan harga BBM untuk kedua kali yaitu pada tanggal 1 Oktober 2005.

Tabel 1. Kenaikan Harga Eceran BBM di SPBU Indonesia, Tahun 2005

(Rp/liter)

Tanggal	Pertamax	Premium	Minyak Tanah	Minyak Solar
3 Januari	4000	1810	1800	1650
1 Maret	4000	<b>2400</b>	<b>2200</b>	<b>2100</b>
1 September	<b>5700</b>	2400	2200	2100
<b>1 Oktober</b>	<b>5700</b>	<b>4500</b>	<b>2000</b>	<b>4300</b>
21 Nopember	<b>5400</b>	4500	2000	4300
1 Desember	5400	4500	2000	4300

Sumber: Pertamina

Untuk guncangan harga beras, Tabel 2 tidak menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Hal itu disebabkan data harga tersebut merupakan rata-rata dari berbagai lokasi di Indonesia. Pada kenyataannya pada wilayah tertentu kenaikan harga pada Pebruari tahun 2002 memberikan pengaruh yang berarti. Hal yang sama pasti terjadi pada kenaikan harga Pebruari 2003 dan Desember 2004-2006.

Tabel 2. Perkembangan harga Eceran Beras Medium di Indonesia, Tahun 2002-2005  
(Rp/Kg)

Bulan	2002	2003	2004	2005	2006
Januari	2963	2848	2818	3095	3879
Februari	<b>3057</b>	<b>2870</b>	2847	3130	4233
Maret	2906	2868	2831	3164	4194
April	2853	2802	2825	3119	4020
Mei	2862	2757	2829	3088	4013
Juni	2820	2753	2809	3070	4131
Juli	2763	2701	2750	3138	4172
Agustus	2691	2712	2848	3180	4233
September	2665	2781	2875	3231	4225
Oktober	2729	2785	2892	3417	4238
Nopember	2796	2775	2913	3510	4273
Desember	2807	2778	<b>2972</b>	<b>3581</b>	<b>4490</b>
Rataan	2826	2786	2851	3227	4160

Sumber: Bulog

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari data Susenas tahun 2002 dan 2005, data PDB dan PDRB, data keadaan angkatan kerja, dan jumlah penduduk bersumber dari Badan Pusat Statistik.

### Analisis Data

Data yang digunakan dianalisis dengan statistik deskriptik dengan menggunakan teknik tabulasi silang, grafik dan gambar. Dua peubah dependen kunci dalam studi ini adalah PDB dan pangsa pengeluaran pangan.

Untuk menghindari pengaruh inflasi, maka PDB yang digunakan merupakan PDB harga konstan menggunakan tahun dasar 2000. Untuk mempertajam analisis digunakan juga peubah PDB per kapita dengan formula sebagai berikut:

$$PDBK_t = PDB_t / POP_t \quad (1)$$

dimana:

$PDBK_t$  = PDB per kapita tahun t

$PDB_t$  = PDB harga konstan tahun t

$POP_t$  = Populasi penduduk tahun t

Pangsa pengeluaran pangan rumahtangga yang digunakan dalam studi ini adalah rasio pengeluaran rumahtangga untuk belanja pangan dan pengeluaran total

rumahtangga selama sebulan. Perhitungan pangsa pengeluaran pangan (*PF*) menggunakan formula berikut:

$$PF_t = \frac{PP_t}{TP_t} * 100\% \quad (2)$$

dimana:

$PF_t$  = Pangsa pengeluaran pangan rumahtangga tahun t (%)

$PP_t$  = Pengeluaran rumahtangga untuk belanja pangan tahun t (Rp/bulan)

$TP_t$  = Total pengeluaran rumahtangga tahun t (Rp/bulan)

## **PERTUMBUHAN PDB SEBAGAI INDIKAOR KESEJAHTERAAN**

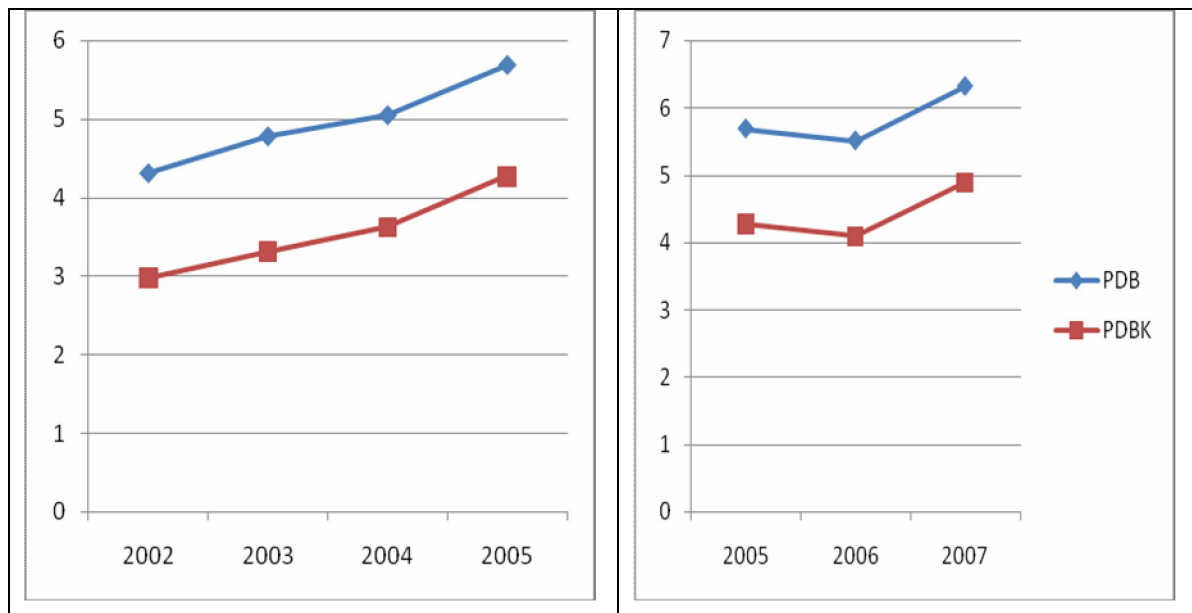
### **Pertumbuhan PDB dan PDB Per Kapita**

Sebagai indikator kesejahteraan makro, PDB dan PDB per kapita Indonesia pada periode 2002 – 2005 mengalami pertumbuhan masing-masing 4,96% dan 3,55% per tahun (Tabel 3 dan Gambar 1). Fakta ini mengindikasikan bahwa sebagai suatu negara, baik pada periode 2002-2005 maupun 2005-2007, perekonomian Indonesia mengalami kemajuan.

Tabel 3. Pertumbuhan PDB dan PDB Per Kapita Indonesia, Periode 2002-2005 dan 2005-2007

Tahun	PDB (%)	PDBK (%)
2002	4,31	2,98
2003	4,78	3,31
2004	5,05	3,62
2005	5,69	4,27
2006	5,51	4,09
2007	6,32	4,89
Rataan		
2002-2005	4,96	3,55
2005-2007	5,84	4,42

Sumber: BPS (berbagai terbitan, diolah)



Gambar 1. Pertumbuhan PDB dan PDB Per Kapita Indonesia, Periode 2002-2005 dan 2005-2007

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah bersama pihak dunia usaha dan masyarakat secara makro mampu menekan dampak kenaikan harga beras dan harga BBM yang terjadi pada periode tersebut. Walaupun ada dampak kenaikan harga BBM pada tahun 2005 yang menyebabkan penurunan pertumbuhan PDB pada tahun 2006, namun dampaknya tidak berlanjut hingga ke tahun 2007. Dimana pada tahun 2007 PDB tumbuh melampaui pertumbuhan pada tahun 2005.

Gambar 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB dan PDB per kapita mempunyai arah yang sama. Dua indikator ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia meningkat kesejahteraannya. Namun demikian, karena sifatnya yang sangat agregat, indikator pertumbuhan PDB dan PDB per kapita masih dianggap belum cukup. Perlu dilihat apakah pertumbuhan dua indikator tersebut sudah mampu menurunkan jumlah pengangguran yang dapat juga digunakan sebagai proksi kesejahteraan.

Ternyata pertumbuhan PDB hingga 4,96 persen pada periode 2002-2005 belum mampu menurunkan jumlah pengangguran yang terus meningkat sebesar 10,5 persen per tahun pada periode yang sama (Tabel 4). Ketika PDB tumbuh 5,84 persen per tahun pada periode 2005-2007, jumlah pengangguran sudah mulai berkurang sebesar 0,4 persen setiap tahun.

Dengan demikian besarnya angka pertumbuhan menentukan apakah pertumbuhan ekonomi secara makro sudah mampu meningkatkan kesejahteraan yang diproksi dari makin menurun jumlah penduduk miskin. Selain besarnya, faktor lain yang menentukan kemampuan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk adalah kualitas dari pertumbuhan PDB tersebut. Apakah pertumbuhan PDB yang terjadi hanya dinikmati kelompok tertentu sehingga sebarannya tidak merata. Untuk itu perlu dipilah lebih lanjut pangsa PDB dan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha, jenis pengeluaran dan distribusinya pada wilayah Indonesia.

Tabel 4. Hubungan Pertumbuhan PDB dan Jumlah Pengangguran Terbuka di Indonesia, Tahun 2002-2007

Tahun	Pertumbuhan PDB (%)	Pengangguran Terbuka (juta jiwa)
2002	4,31	9,1
2003	4,78	9,8
2004	5,05	10,3
2005	5,69	11,9
2006	5,51	10,9
2007	6,32	10,0
Rataan 02-05	4,96	10,3
R (%/thn) 02-05	-	10,5
Rataan 05-07	5,84	10,9
R (%/thn) 05-07	-	-0,4

Sumber: BPS (berbagai terbitan)

### **PDB Sektor Pertanian dan Non Pertanian**

Pemilahan PDB berdasarkan lapangan usaha menunjukkan bahwa pangsa PDB pertanian jauh lebih kecil dan menurun terus dari 15,39 persen pada tahun 2002 menjadi 13,83 persen tahun 2007. Hal sebaliknya terjadi pada PDB non pertanian, yaitu 84,61 persen tahun 2002 menjadi 86,17 persen pada tahun 2007 (Tabel 5). Di sisi lain sektor pertanian menerima beban untuk menyerap angkatan kerja relatif lebih besar dibandingkan sektor non pertanian.

Konsekuensinya produktivitas sektor pertanian lebih rendah dari sektor non pertanian, sehingga pertumbuhan PDB sektor pertanian juga relatif lebih rendah dari sektor non pertanian (Tabel 6). Aktivitas sektor pertanian umumnya berada di wilayah pedesaan, dengan demikian menjadi wajar jika jumlah penduduk miskin di pedesaan jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Sebagian besar dari mereka adalah petani. Menurut BPS (2008) rata-rata jumlah penduduk miskin selama tahun 2002-2005 di pedesaan mencapai 24,3 juta jiwa, sedangkan di perkotaan 14,5 juta jiwa per tahun.

Tabel 5. Pangsa PDB dan Angkatan Kerja Pertanian dan Non Pertanian di Indonesia, 2002-2007

(%)

Tahun	PDB Pertanian	PDB Non Pertanian	Angkatan Kerja Pertanian	Angkatan Kerja Non Pertanian
2002	15,39	84,61	44,34	55,66
2003	15,24	84,76	46,26	53,74
2004	14,98	85,02	43,33	56,67
2005	14,54	85,46	43,97	56,03
2006	14,15	85,85	42,05	57,95
2007	13,83	86,17	41,24	58,76

Sumber: BPS (berbagai terbitan, diolah)

Pemilahan PDB menurut sektor menunjukkan bahwa ada ketimpangan antara pangsa PDB dengan pangsa serapan tenaga kerja antar sektor. Hal ini hendaknya mendapat perhatian bahwa pembangunan di pedesaan, baik sektor pertanian maupun sektor pendukungnya perlu lebih ditingkatkan. Upaya tersebut selain mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan juga sekaligus memecahkan masalah penyediaan pangan dan urbanisasi.

Tabel 6. Pertumbuhan PDB Pertanian dan Sektor Non Pertanian di Indonesia, Tahun 2002-2007

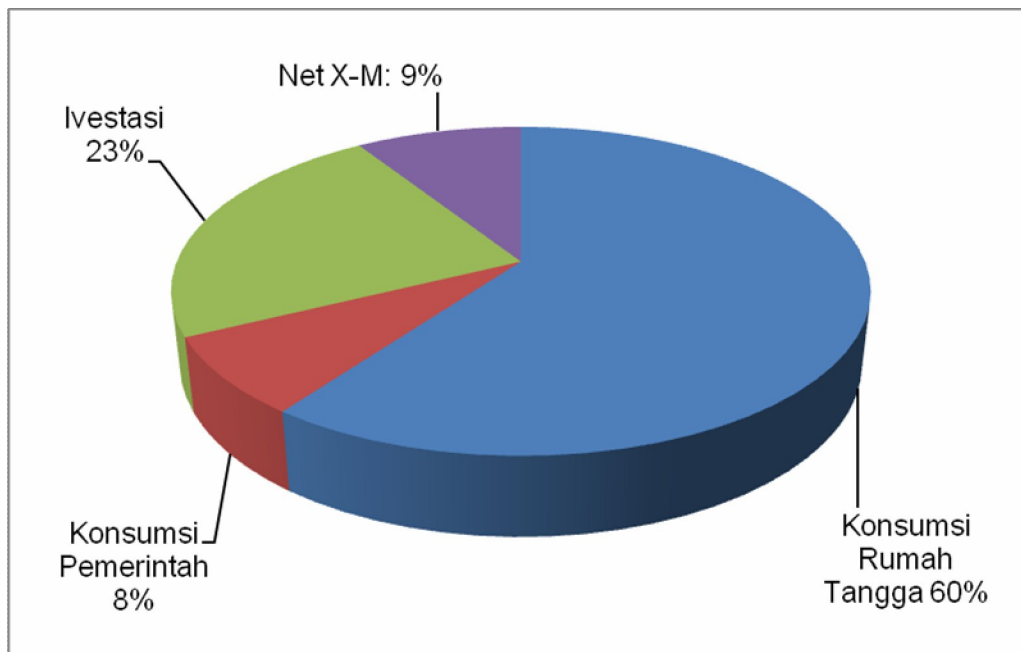
(%)

Tahun	Per-tanian	T&G	Industri	LGA	Bangunan	PHR	A&K	KP&JP	Jasa
2002	2,63	1,00	5,29	8,94	5,48	3,84	8,39	6,85	3,75
2003	3,79	-1,37	5,33	4,87	6,10	5,45	12,19	6,73	4,41
2004	3,26	-4,48	6,38	5,22	7,49	5,69	13,38	7,70	4,85
2005	2,72	3,20	4,60	6,30	7,54	8,30	12,76	6,70	5,16
2006	3,36	1,70	4,59	5,76	8,34	6,42	14,38	5,47	6,16
2007	3,50	1,98	4,66	10,40	8,61	8,46	14,38	7,99	6,60

Sumber: BPS (berbagai terbitan)

### **PDB Berdasarkan Pengeluaran**

Komponen PDB berdasarkan pengeluaran terdiri dari konsumsi rumahtangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor impor. Selama lima tahun terakhir komposisinya juga masih sangat timpang. Konsumsi rumahtangga mendominasi hingga 60 persen, sedangkan investasi 23 persen, net ekspor-impor sembilan persen, dan konsumsi pemerintah delapan persen (Gambar 2).



Gambar 2. Rataan Distribusi PDB Nasional menurut Jenis Pengeluaran, Tahun 2002-2005

Besaran Pangsa dan pertumbuhan masing-masing komponen dapat dijadikan alasan kenapa besaran tingkat pertumbuhan yang terjadi masih belum mampu menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Pangsa konsumsi rumah tangga tidak banyak berarti dalam penyerapan tenaga kerja jika tidak diikuti pangsa investasi yang besar. Ini berarti barang konsumsi banyak berasal dari sektor informal atau sektor formal yang jumlahnya tidak bertambah. Kondisi ini tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai, sehingga banyak angkatan kerja berpindah ke sektor pertanian dan menyebabkan naiknya jumlah pengangguran di perkotaan.

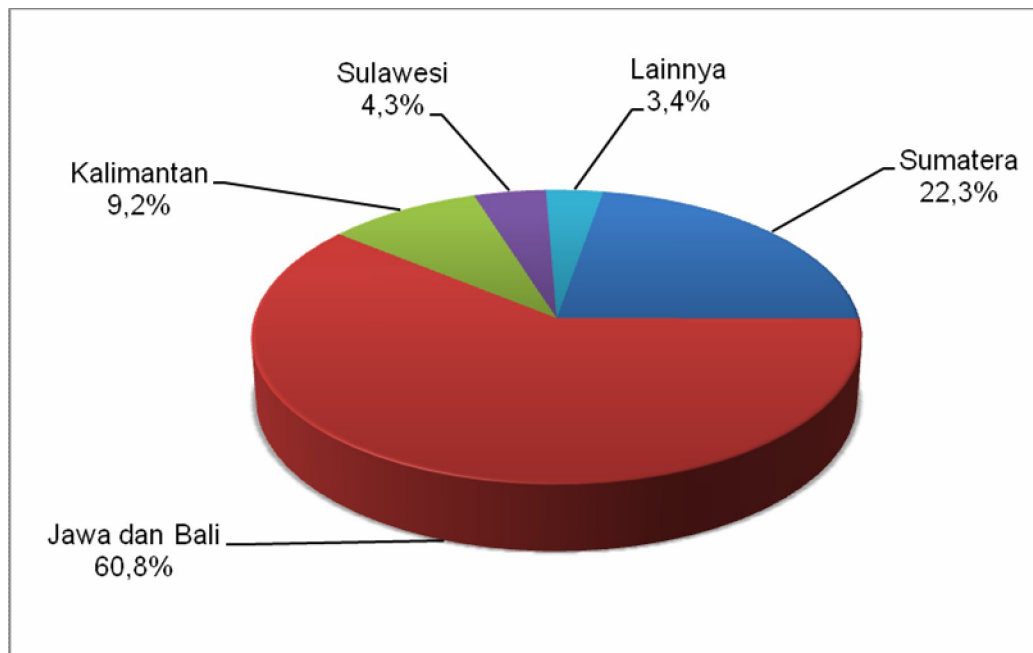
Pertumbuhan PDB 4,96 persen dengan pangsa pengeluaran konsumsi 60 persen, sementara angka pengangguran tumbuh 10,5 persen maka dapat ditafsirkan bahwa penduduk berpendapatan tinggi hidup mewah dengan pola konsumtif, sedangkan kelompok pendapatan rendah hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar semata. Fakta ini makin memperkuat bahwa pertumbuhan PDB masih belum berkualitas.

### **PDB menurut Wilayah**

Sebaran PDB menurut wilayah juga masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan (Gambar 3). Aktivitas ekonomi terpusat di Jawa dan Bali dengan pangsa PDB mencapai 60,8 persen. Kondisi ini menyebabkan tarikan migrasi ke kota-kota

besar di Jawa dan Bali dari pulau-pulau lain. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak sosial dan politik yang negatif. Karena sebagian sumberdaya dipergunakan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi dan penduduk di Jawa dan Bali.

Selain pangasanya yang besar, pada periode yang sama data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB di Jawa dan Bali juga relatif besar (5,1%) dibandingkan wilayah lain (3,0% – 4,1%), kecuali Sulawesi (5,4). Pertumbuhan PDB Sulawesi yang melampaui Jawa dan Bali mengindikasikan bahwa jika alokasi sumberdaya lebih disebar merata maka kemampuan luar Jawa untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi akan makin meningkat. Dengan demikian kesejahteraan akan makin menyebar dan tidak hanya dinikmati penduduk sektor non pertanian, penduduk kota, dan penduduk pulau Jawa dan Bali.



Sumber: BPS (berbagai terbitan)

Gambar 3. Rataan Distribusi PDB menurut Wilayah di Indonesia, 2002-2005

## **PANGSA PENGELUARAN PANGAN SEBAGAI INDIKATOR KESEJAHTERAAN**

### **Pangsa Pengeluaran Pangan Menurut Wilayah**

Secara agregat nasional pangsa pengeluaran rumah tangga berdasarkan mata pencaharian dan wilayah desa-kota mengalami peningkatan (Tabel 7). Hal yang sama secara konsisten terjadi juga pada tiga provinsi lokasi penelitian. Berdasarkan Hukum

Engle, fakta ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan rumahtangga di Indonesia mengalami penurunan.

Tabel 7. Sebaran Pangsa Pengeluaran Pangan Rumahtangga menurut Wilayah, Tahun 2002-2005

(%)

Uraian	Sumsel			Jabar			Jateng			Indonesia		
	2002	2005	Perubahan	2002	2005	Perubahan	2002	2005	Perubahan	2002	2005	Perubahan
<b>Pertanian</b>												
Kota	67.5	78.3	16.0	63.2	68.4	8.2	63.3	76.7	21.2	64.4	72.9	13.2
Desa	71.9	84.3	17.2	65.9	76.7	16.4	65.3	77.4	18.5	69.2	81.1	17.2
Kota+Desa	71.6	83.8	17.0	65.4	74.9	14.5	64.9	77.3	19.1	68.6	80.1	16.8
<b>Non pertanian</b>												
Kota	57.6	69.4	20.5	55.8	65.0	16.5	56.8	69.6	22.5	54.4	66.0	21.3
Desa	65.5	79.4	21.2	64.5	75.5	17.1	62.7	75.0	19.6	64.3	76.5	20.0
Kota+Desa	59.5	72.4	21.7	58.9	69.3	17.7	59.3	72.1	21.6	57.7	70.3	21.8

Sumber: SUSENAS 2002 dan 2005 (diolah)

Jika dikomparasi antara rumahtangga berdasarkan mata pencaharian petani dan non petani, rumahtangga non pertanian relatif lebih sejahtera dibandingkan dengan rumahtangga petani. Hasil ini sejalan dengan analisis makro, dimana PDB sektor non pertanian baik pangsa maupun pertumbuhan lebih besar jika dibandingkan dengan sektor pertanian. Namun demikian rumahtangga non pertanian lebih sensitif terhadap guncangan ekonomi seperti kenaikan harga BBM dan harga beras yang menyebabkan penurunan kesejahteraan. Sensitivitas tersebut dapat dilihat besarnya persentase perubahan kenaikan pangsa pengeluaran pangan antara tahun 2002 – 2005.

Sensitifnya dampak tersebut pada rumahtangga non pertanian diantaranya disebabkan oleh masih relatif besarnya pangsa pengeluaran pangan penduduk Indonesia, termasuk rumahtangga yang berusaha di non pertanian. Karena kenaikan harga-harga barang dan jasa akibat kenaikan harga BBM mendorong rumahtangga mengutamakan konsumsi pangan dibandingkan konsumsi non pangan, seperti jasa dan barang mewah.

Pemilahan lebih rinci berdasarkan rumahtangga di kota dan desa, Tabel 7 menunjukkan bahwa rumahtangga kota relatif sejahtera dibandingkan rumahtangga desa baik pada kelompok pertanian maupun non pertanian. Namun sensitifitasnya terhadap kenaikan harga BBM dan harga beras tidak menunjukkan keunikan. Secara agregat rumah tangga non pertanian lebih sensitif dibandingkan rumahtangga pertanian. Namun pada tiga provinsi lokasi penelitian bervariasi.

## Pangsa Pengeluaran Pangan Menurut Kelas Pendapatan

Secara nasional pangsa pengeluaran rumahtangga pada berbagai kelas pendapatan dalam periode 2002-2005 mengalami peningkatan (Tabel 8). Hal yang sama secara konsisten terjadi juga pada tiga provinsi lokasi penelitian. Ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan pada kelompok rumahtangga berpendapatan rendah, sedang dan tinggi di Indonesia secara umum mengalami penurunan.

Jika dipilah berdasarkan rumahtangga pertanian dan non pertanian, pada kelas pendapatan yang sama, rumahtangga non pertanian lebih sejahtera dibandingkan rumahtangga non pertanian. Hasil ini sejalan dengan pendekatan makro, karena penduduk yang bekerja pada sektor non pertanian umumnya tinggal di kota dengan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dan beragam

Tabel 8. Sebaran pangsa pengeluaran pangan rumahtangga menurut kelas pendapatan, 2002-2005

(%)

Uraian	Sumsel			Jabar			Jateng			Indonesia		
	2002	2005	Perubahan (%)	2002	2005	Perubahan (%)	2002	2005	Perubahan (%)	2002	2005	Perubahan (%)
<b>Pertanian</b>												
Rendah	73.3	83.1	13.4	67.4	77.5	15.0	67.5	78.9	16.9	69.7	81.8	17.4
Sedang	71.1	84.5	18.8	64.5	74.1	14.9	64.4	77.1	19.7	68.1	79.5	16.7
Tinggi	66.0	83.7	26.8	56.0	64.7	15.5	53.7	68.2	27.0	65.3	72.8	11.5
<b>Non Pertanian</b>												
Rendah	66.5	72.0	8.3	63.8	75.2	17.9	65.7	77.8	18.4	63.1	76.4	21.1
Sedang	63.2	73.4	16.1	59.8	69.7	16.6	60.9	74.0	21.5	58.5	71.9	22.9
Tinggi	50.0	71.3	42.6	50.5	59.6	18.0	49.0	62.2	26.9	49.6	60.6	22.2

Sumber: SUSENAS 2002 dan 2005, diolah

Sensitivitas rumahtangga menghadapi guncangan ekonomi bervariasi. Secara agregat nasional respon dampak kenaikan harga beras dan harga BBM terhadap pangsa pengeluaran rumahtangga menurut kelas pendapatan baik pada rumahtangga pertanian dan non pertanian tidak menunjukkan keunikan. Perilaku yang sama terjadi pada Provinsi Jawa Barat. Pada Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Selatan menunjukkan bahwa makin tinggi kelas pendapatan makin sensitif terhadap guncangan ekonomi.

Perbedaan perilaku tersebut dapat ditafsirkan bahwa, pada daerah seperti Jawa Barat yang merupakan daerah penyangga ibukota DKI Jakarta, tingkat pendidikan relatif tinggi. Dengan demikian selain akses ekonomi yang baik akses fisik terhadap pangan dan informasi tentang gizi relatif baik. Sehingga guncangan harga BBM dan

harga pangan pada kelompok kelas pendapatan sedang, pengaruhnya tidak terlalu sensitif, karena penyesuaian dan antisipasi terhadap guncangan ekonomi sudah cukup baik.

Satu hal yang menarik adalah bahwa pada tahun 2002 ada hubungan positif antara kelas pendapatan dengan pangsa pengeluaran pangan. Makin tinggi pendapatan makin rendah pangsa pengeluaran pangan. Namun setelah ada guncangan ekonomi pada tahun 2005, khusus pada lokasi Provinsi Sumatera Selatan terjadi anomali. Kelas pendapatan menengah pangsa pengeluaran pangannya meningkat lebih tinggi dari kelas pendapatan rendah baik pada rumahtangga pertanian dan non pertanian.

Anomali tersebut secara teori memungkinkan terjadi. Jika asumsi yang digunakan berubah, misal kurva indeferen tidak cembung ke titik nol dan kesejahteraan tidak disejalan dengan kurva indefeen yang makin ke kanan maka Kaidah Engel menjadi tidak relevan lagi. Pada tataran data primer, hasil penelitian Ilham *et. al* (2008) menunjukkan ada kasus bahwa pada rumahtangga pendapatan rendah pangsa pengeluaran pangan lebih kecil dari rumahtangga berpendapatan lebih tinggi. Ternyata pola konsumsi rumahtangga tidak hanya dipenaguhi pendapatan tetapi faktor budaya juga menentukan.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

### **Kesimpulan**

Dari uraian sebelumnya dapat ditarik beberapa butir kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan pertumbuhan PDB sebagai indikator kesejahteraan makro hasilnya tidak sejalan dengan penggunaan pangsa pengeluaran pangan sebagai indikator mikro untuk melihat tingkat kesejahteraan.
2. Secara makro, pangsa PDB pertanian yang relatif kecil masih menanggung beban menyerap angkatan kerja dalam pangsa yang relatif besar sehingga produktivitasnya menjadi rendah. Secara mikro kondisi ini terlihat secara konsisten bahwa rumah tangga non pertanian relatif lebih sejahtera dibandingkan rumah tangga pertanian baik di desa maupun di kota, serta pada kelompok dengan kelas pendapatan yang sama.
3. Rumahtangga non pertanian baik di kota maupun di desa serta pada berbagai kelas pendapatan lebih sensitif terhadap guncangan ekonomi dibandingkan rumahtangga pertanian.

4. Selain memiliki akses ekonomi, akses fisik, dan akses informasi terhadap pangan, faktor budaya juga menentukan perilaku konsumsi yang mempengaruhi sensitivitas rumah tangga terhadap guncangan ekonomi.
5. Pemerataan pembangunan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan penduduk di berbagai lapisan, tetapi dapat juga mengurangi permasalahan sosial dan politik akibat meningkatnya migrasi ke kota besar di Jawa dan Bali serta meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan memproduksi pangan untuk meningkatkan pendapat penduduk pedesaan.

### **Implikasi Kebijakan**

1. Penggunaan PDB sebagai indikator kesejahteraan masih belum cukup. Diperlukan besaran dan kualitas tertentu sehingga perannya dapat menurunkan angka pengangguran. Untuk melihat lebih rinci pada tingkat rumah tangga diperlukan indikator pangsa pengeluaran pangan.
2. Diperlukan perlakuan yang berbeda untuk mengantisipasi dampak guncangan ekonomi pada rumah tangga non pertanian yang membutuhkan waktu relatif cepat dibandingkan rumah tangga pertanian.
3. Untuk lebih mensejahterakan masyarakat maka upaya pembangunan sebaiknya dilakukan lebih merata antar sektor, antar wilayah dan antar kawasan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amang, B. 1984. The Price of Rice and Inflation In Indonesia 1967-1981. Dissertation. Submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Economics in the Graduate Division of the University of California,
- BPS. 2008. Indikator Ekonomi, Juni 2008. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2008. Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 2008. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2008. Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2007. Indikator Ekonomi, Mei 2007. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2006. Pendapatan Nasional Indonesia 2002-2005. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2005. Pendapatan Nasional Indonesia 2001-2004. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.

- BPS. 2004. Pendapatan Nasional Indonesia 2000-2003. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2003. Pendapatan Nasional Indonesia 1999-2002. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2006. Pendapatan Nasional Indonesia 2002-2005. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2006. Pendapatan Nasional Indonesia 2002-2005. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2000-2007. Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 1999-2006. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- BPS. 2006. Penduduk Indonesia: Hasil Survei Penduduk antar Tahun 2005. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Bulog. 2008. <http://www.bulog.co.id/datastatistik>
- CSIS. 2002. Tinjauan Perkembangan Ekonomi. 31(1): 36-38; 31(2): 156-158; 31(3): 297-298; 31(4): 414-416. Center for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Deaton, A, and J. Muellbauer. 1980. Economics and Consumer Behavior. Cambridge University Press, London.
- Gunawan, A. H. 1991. Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia.PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ilham, N., K. Suradisastra, T. Pranadji, A. Agustian, E. Lestari, H., dan G.S. Hardono. 2007. Analisis Profil Petani dan Pertanian Indonesia. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor.
- Ilham, N. dan B.M. Sinaga. 2007. Penggunaan Pangsa Pengeluaran Pangan sebagai Indikator Komposit Ketahanan Pangan. Jurnal Sosial Ekonomi dan Agribisnis SOCA. Vol 7(3): 269-277.
- Lipsey, R.G., P.N. Courant, D.D. Purvis, and P.O. Steiner. 1992. Economics. Harper Collins College Publisher, New York.
- Pertamina. 2008. <http://pertamina.com/index.php>
- Riasa, P., Antonaria, A. Saepudin, A.A. Risadi, M. Ruslan, dan Wilopo. 2002. Buku Pedoman *Safeguarding*: Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Siregar, H. 2007. Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. Makalah disampaikan pada seminar nasional “Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dalam PenanggulanganKemiskinan. Bogor, 21 Agustus 2007. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Departemen Pertanian, Bogor.
- Varian, H. R. 1992. Microeconomic Analysis. Third Edition. W.W. Norton & Company, New York.